

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Basri, Rusdaya. *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.
- BPS Kabupaten Barito Kuala. 'KECAMATAN ANJIR MUARA DALAM ANGKA Anjir Muara District in Figures 2024 Volume 13, 2024', 13:xxviii+103. BPS Kabupaten Barito Kuala/BPS-Statistics Barito Kuala Regency, 2024
- Fajar, Mukti, and Yulianti Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normative*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015.
- Jamaluddin, and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana, 2016.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penulisan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2009.
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, and Amiur Nuruddin. *Hukum perdata Islam di Indonesia: studi kritis perkembangan hukum Islam dari fikih, UU no. 1/1974, sampai KHI*. Ed. 1. Rawamangun, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2004.
- Rahmawati, Theadora. *FIQH MUNAKAHAT 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. Duta Media Publishing, 2021.
- Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Edisi pertama. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2015.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penulisan Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1, cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tenripadang, Andi. 'HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL', n.d.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2008.
- Wafa, Moh. Ali. *HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materiil*. Tangerang Selatan: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Anwar, Syaiful. 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974' 1 (Mei 2021).
<https://ejournal.staika.ac.id/index.php/alkamal/article/download/6/2>.
- Aurelia Oktavira, Bernadetha. 'Arti Peristiwa Hukum dan Hubungan Hukum'.
- Hakim, Kholil Arkham. 'ANALISIS YURIDIS TERHADAP HUKUM NIKAH SIRI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983', n.d.
- Hanifah, Uni. 'TINJAUAN YURIDIS NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Komparasi)'. 2021, n.d.
- Lestari, Evi. 'Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menurunkan Pernikahan Siri Perspektif Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons (Studi Di Desa Ngroto Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri)', 2024, 126.
- Maulina, Nurul. 'PELAKSANAAN WALIMATUL 'URS SEBELUM AKAD NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kabupaten Gayo Lues)', 2023.
- Rianti, Ari. 'NIKAH SIRRI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah)', 2018.

Rosidayanti. 'Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan Di KUA Patampanua Kabupaten Pinrang', 2020, 106.

Sry Adyzah, Sumiati. 'PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN', n.d.

Syhadati, Maharani Alifatus. 'URGENSI NIKAH SIRI DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA SOSIAL (Studi Di Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara Kab. Lampung Timur)', 2020, 72.

Yulyana Mahendra, Cut Putri, and Linayani Lestari. 'KEDUDUKAN WALIMATUL 'URS DALAM MASYARAKAT ANEUK JAMEE DARI PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARI'AH' 9 (2020).

PERATURAN

Al Quran Terjemah, n.d.

'Buku Kompilasi Hukum Islam'. Kementrian Agama RI, 2018.

'Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', n.d.

'Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-undang Hukum Pidana', n.d.

'Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', n.d.

'Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', n.d.

'Pasal 280 KUHPerdara', n.d.

'Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', n.d.

'Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 8 Ayat 4.', n.d.

'Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil', n.d.

'Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', n.d.

'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara', n.d.

‘Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87’,
n.d.

‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak’, n.d.

INTERNET

Hukum Online.com (blog), n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-peristiwa-hukum-dan-hubungan-hukum-lt5aebc758a2210/>.

‘Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023’, n.d.
baritokualakab.bps.go.id.

Christha Auli, Renata. ‘Pemahaman Pidana Penyertaan Dalam Pasal 55 KUHP’.
Hukum Online.Com (blog). Accessed 24 March 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemahaman-pidana-penyertaan-dalam-pasal-55-kuhp-lt6577a8d85574e/>.

Munawaroh, Nafiatul. ‘Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat Hukum’. *Hukum Online.com* (blog), n.d.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/>.

‘Sumber Website’, n.d.

WAWANCARA

Ro’yani, Moh. PLT Camat Anjir Muara, Wawancara Pribadi, Kecamatan Anjir Muara, 11 February 2025.

Sam’ani, S.Ag., M.H. Wawancara dengan Kepala KUA Anjir Muara Bapak Sam’ani, S.Ag., M.H, 24 February 2025.

Bapak RH, Pegawai Pemerintah, Wawancara Pribadi, 11 February 2025.

Ibu SR, Pegawai Pemerintah, Wawancara Pribadi, 11 February 2025.

Mba NH, Pegawai Pemerintah, Wawancara Pribadi, 20 February 2025